

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KESEHATAN**

Jalan. H. Boejasin No.9 Pelabuhan Telp. (0512) 21098

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia- Nya sehingga penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut merupakan sebuah laporan yang memuat penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategi (Renstra).

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) SKPD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2020 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Pelaihari, 15 Februari 2020
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut,

Hj. Nina Sandra, SKM, MM
NIP. 196407101985112002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Dinas Kesehatan	1
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	5
A. Urusan Wajib	5
B. Urusan Pilihan	8
C. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8
D. Urusan Pemerintahan Umum	9
BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	10
A. Tugas Pembantuan Yang di Terima Dari Pemerintah / Pemerintah provinsi	10
B. Tugas Pembantuan Yang diberikan.....	10
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	11
A. Kerjasama Daerah	11
B. Koordinasi dengan Instansi Pertikal di Daerah	11
C. Pengelolaan Kawasan Khusus	11
D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	11
E. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.....	12
BAB V PENUTUP	13
A. Kesimpulan	13
B. Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan	13

LAMPIRAN

Lampiran I: Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan 2020

Lampiran II : Tataran pelaksana kebijakan (8 aspek) administrasi umum Dalam rangka EKPPD terhadap LPPD tahun 2020

Lampiran III : Indikator Kinerja Kunci

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era desentralisasi dengan diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2000 berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999, diperbaharui dengan UU Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, maka beberapa peran pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah Daerah sebagai kewenangan wajib dan tugas pembantuan, salah satunya bidang pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu unit kerja yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut berdasar Peraturan Bupati Tanah Laut No. 24 Tahun 2009.

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan maka perlu Mengevaluasi tugas pokok tersebut dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Dinas Kesehatan (LKPJ) dimana dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD.

B. Gambaran Umum Dinas Kesehatan

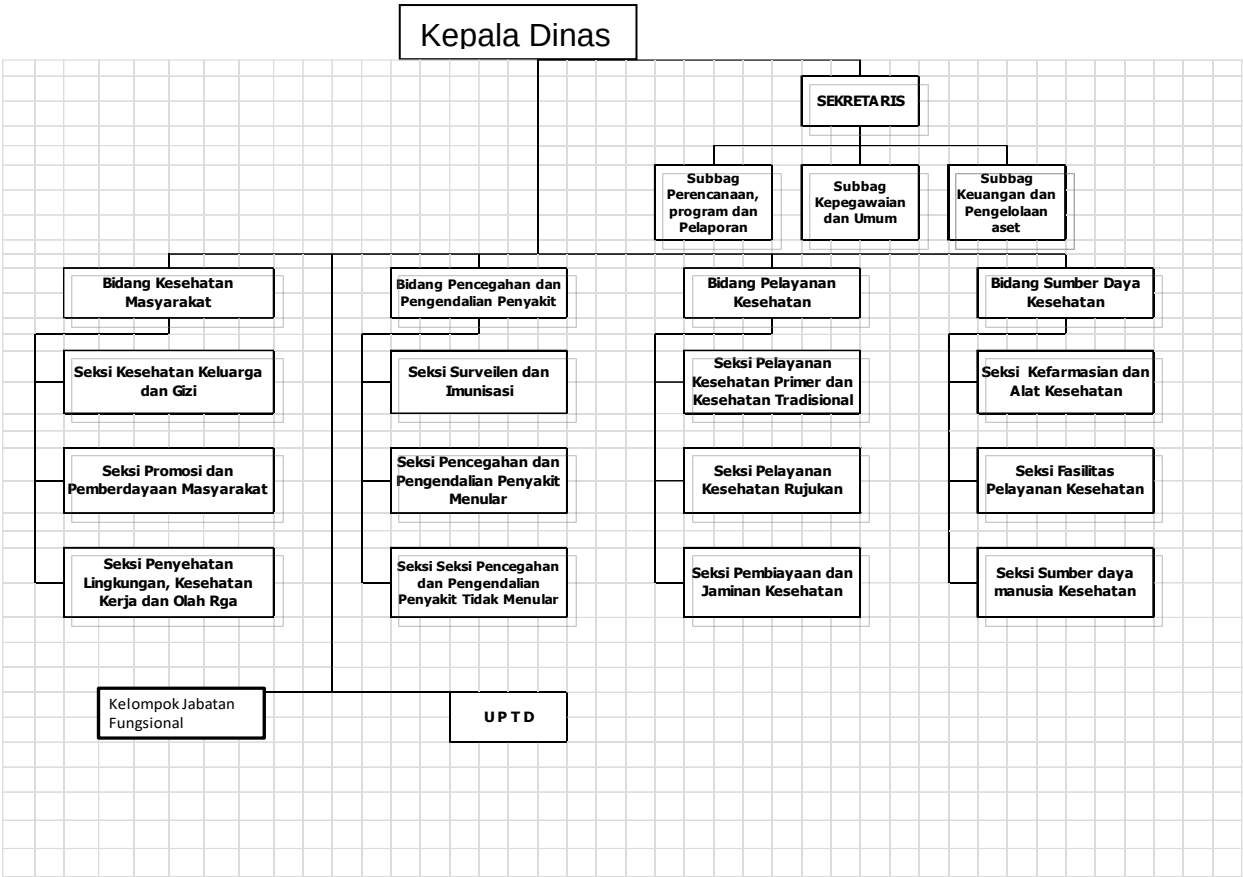
1. Struktur Organisasi

Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
- b. Pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- c. Pembinaan Operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (lembaran Daerah kabupaten tanah Laut tahun 2016 nomor 6, tambahan lembaran daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Bagian Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, UPT Dinas Kesehatan dan kelompok Jabatan Fungsional (dapat dilihat pada bagan SOTK).

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT
(Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No.6 Tahun 2016)



2. Kepegawaian

Keberadaan sumber daya manusia kesehatan sebagai salah satu pendukung utama pelayanan kesehatan, dalam pelaksanaannya sangat mengutamakan pelayanan kesehatan baik melalui institusi puskesmas maupun yang langsung berhubungan dengan Dinas Kesehatan.

Tabel 1.1
JUMLAH PEGAWAI BERDASAR PENDIDIKAN, JABATAN
DAN GOLONGAN

No	Nama Skpd	Jumlah Personil (Org)	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Personil (Org)	Jabatan	Jumlah Personil (Org)	Gol	Jumlah Personil (Org)
1	Dinas Kesehatan	856	SD	2	Eselon II	1	I	2
			SLTP	4	Eselon III	6	II	147
			SLTA	78	Eselon IV	58	III	654
			D1	18	Staf	791	IV	53
			D2	2				
			D3	488				
			D4/S1	222				
			S2	42				
JUMLAH		856		856			856	

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut

3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan terdiri dari 1 buah Rumah sakit tipe C dan 1 buah rumah sakit tipe D, 3 buah Puskesmas perawatan dan 16 buah Puskesmas non Perawatan, semua dalam kondisi baik hanya saja ada beberapa buah yang ruang pelayanannya kurang lengkap atau tidak sesuai dengan Permenkes Nomor 75 tahun 2015.

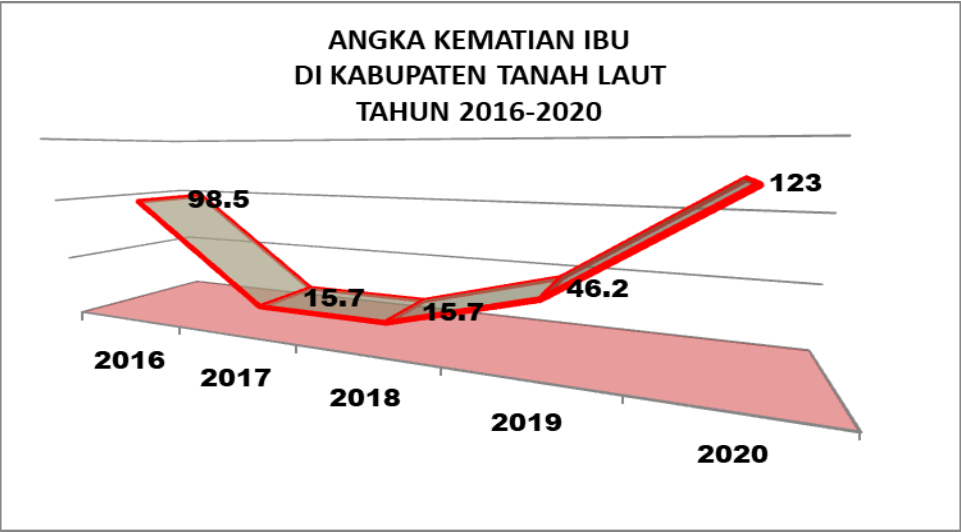
Untuk meningkatkan akses dan pelayanan Puskesmas, maka Puskesmas dibantu sebanyak 60 buah Puskesmas Pembantu dan 125 Poskesdes/Polindes, 36 buah Puskesmas Keliling/Ambulance.

4. Data Statistik

Upaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor demografi, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan serta lingkungan fisik dan sosial ekonomi yang bersifat dinamis dan kompleks. Status kesehatan masyarakat diukur melalui angka kesakitan penyakit (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) serta peningkatan umur harapan hidup (*Life Expectacy*). Berbagai upaya yang dilakukan secara terpadu untuk menekan kesakitan pada penyakit tertentu dan kematian pada bayi, balita dan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas.

Pada dasarnya upaya penurunan jumlah bayi lahir mati, jumlah kematian neonatus, jumlah kematian bayi, kematian balita, kematian ibu melahirkan (maternal) dan upaya program / kegiatan kesehatan lainnya terus dilakukan untuk menekan angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi dan Anak sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas kesehatan Tahun 2019 - 2023.

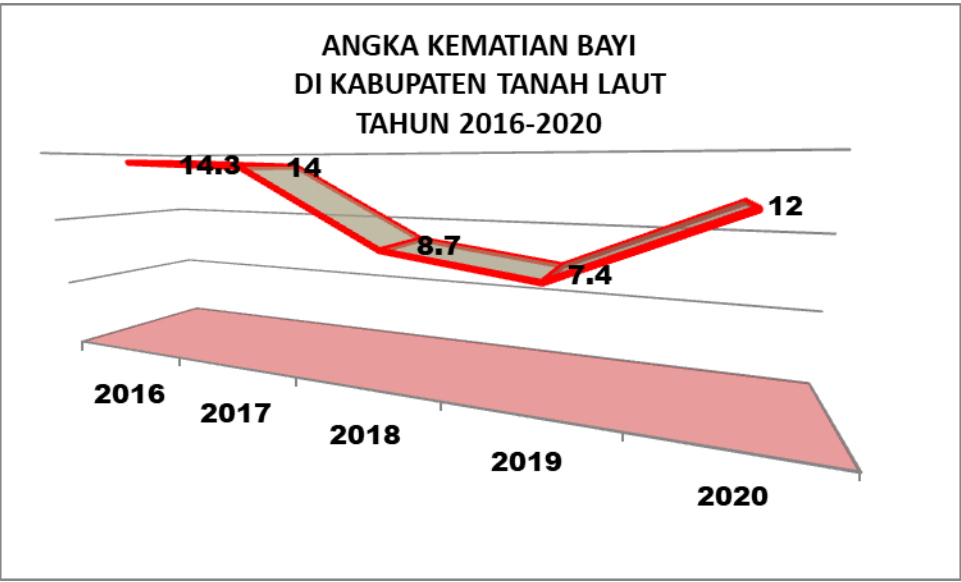
Beberapa indikator keberhasilan program dapat dilihat pada angka kematian ibu tahun 2018 mencapai 15,7 per 100.000 kelahiran hidup dan tahun 2019 naik menjadi 46,2 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun 2020 meningkat tajam menjadi 123 per 100.000 kelahiran hidup, hal ini masih berada di atas target nasional yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup dan target SDGs 70 per 100.000 kelahiran hidup. sebagian besar kematian ibu berada di rumah sakit sehingga perlu peningkat kualitas dokter di RS dengan pelatihan-pelatihan serta peningkatan koordinasi dengan jejaring-jejaring pelayanan kesehatan di tingkat dasar. Untuk jelasnya kondisi kematian ibu dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Angka kematian bayi di Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu lima tahun terakhir terlihat cenderung menurun, pada tahun 2017 mencapai 14 per 1.000 kelahiran hidup dan menurun pada tahun 2018 menjadi 8,7 per 1000 kelahiran hidup, 2019 menjadi 8,2 per 1000 kelahiran hidup. Dan pada tahun 2020 Angka Kematian Bayi hal ini sudah melampaui ekspestasi dari target nasional yaitu 23 per 1000 kelahiran hidup dan target SDGs 12 per 1.000 kelahiran hidup).

Grafik 1.2



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Prevalensi Stunting di Kabupaten Tanah Laut sebesar 10,67% dimana lebih rendah dari target provinsi Kalimantan Selatan yaitu 25% hal ini dapat menggambarkan keberhasilan dari program perbaikan gizi masyarakat melalui pemantauan status gizi masyarakat, pemetaan status gizi, operasi timbang, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan serta penanganan gizi buruk.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. Urusan Wajib

1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, ada 12 indikator SPM bidang kesehatan dengan semua target harus mencapai 100%,

Adapun hasil dari capaian SPM bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil mencapai 80,28%
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin mencapai 90,63%
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir mencapai 96,11%
- d. Pelayanan Kesehatan Balita mencapai 63,13%
- e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar mencapai 25,14%
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif mencapai 27,29%
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut mencapai 49,36%
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hypertensi mencapai 29,89%
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus mencapai 28,12%
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat mencapai 93,80%
- k. Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberculosis mencapai 36,90%
- l. Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi HIV mencapai 59,88%

2. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan merupakan bagian integral dari Rencana pembangunan Menengah Daerah, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan daerah, dalam Pelaksanaan Rencana Kerja secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan perlu dijaga konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan sinergitas pembangunan dengan berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan.

Berdasarkan hasil evaluasi, Pembangunan bidang Kesehatan di kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu 2019-2023 telah melaksanakan Program dan Kegiatan secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman kepada Renstra bidang kesehatan dan memberikan hasil yang positif bagi peningkatan kesehatan masyarakat Kabupaten Tanah Laut, seperti meningkatnya Umur Harapan Hidup, Menurunnya Angka Kematian Ibu dan prevalensi gizi.

Namun demikian juga ada beberapa sasaran program yang kurang memberikan nilai positif seperti Angka kematian Bayi ada kecenderungan sedikit meningkat, hal ini banyak faktor yang mempengaruhinya seperti tingginya pernikahan dini, masih adanya penemuan kasus gizi buruk, masih terjadinya Kejadian Luar biasa Penyakit menular, sehingga dalam penanganannya perlu lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan kerjasama lintas Sektor

seperti Dinas PU, ketahanan pangan, KUA, BPMPD, Dinas Sosial, Lingkungan Hidup dll.

3. Program dan Kegiatan

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Pembangunan bidang kesehatan melaksanakan sebanyak 18 program dan 46 kegiatan, yang tersebar di 24 Unit Pelaksana teknis Kesehatan yang tersebar di 11 Kecamatan.

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dinas Kesehatan mendapat anggaran sebesar Rp. 256.477.237.923,- dan realisasi anggaran adalah Rp. 195.455.442.323,- atau mencapai 76%. Untuk jelasnya program dan kegiatan Urusan Wajib Dinas Kesehatan Dapat dilihat pada tabel di lampiran 1.

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prioritas penggunaan dana APBN bila kegiatan yang dibiayai APBD dapat menggunakan APBN seperti Perjalanan Dinas dalam rangka pembinaan teknis pelayanan dan pertemuan-pertemuan evaluasi program dan kegiatan atau pertemuan teknis program.
- b. Adanya pandemi Covid 19 di tahun 2020 sebagian besar anggaran di refocusing / dirasionalisasi / pergeseran untuk penanganan pandemi covid 19

Untuk mengatasi masalah di atas maka usaha yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan inventarisasi kegiatan yang bisa didanai oleh APBN.
- b. Melakukan berbagai macam inovasi perencanaan anggaran program/kegiatan di era pandemi covid 19 agar kegiatan dapat tetap terlaksana dengan baik dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Demikian juga permasalahan dalam mencapai sasaran program terutama untuk pencapaian target RPJMD Kabupaten dibidang kesehatan tahun 2020. Disamping permasalahan di atas pencapaian indikator Kinerja utama Dinas Kesehatan terlihat tahun 2020 ada perbaikan dengan prevalensi gizi stunting. Namun ada peningkatan pada Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Beberapa Kegiatan penurunan AKI dan AKB yang telah dilakukan melalui kebijakan Making Pregnancy Safer (MPS). Salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu dan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan ibu serta neonatal di tingkat pelayanan dasar dan pelayanan rujukan.

Perhatian khusus harus diberikan terhadap peningkatan kesehatan ibu termasuk bayi baru lahir, bayi dan balita dengan menyelenggarakan berbagai

upaya terobosan yang didukung oleh kemampuan manajemen tenaga pengelola dan pelaksana program KIA.

Untuk meningkatkan status kesehatan ibu telah dilakukan berbagai upaya di antaranya baik yang bersifat promotif, preventif, maupun kuratif dan rehabilitative. Upaya tersebut berupa pelayanan kesehatan pada ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, penanganan komplikasi, pelayanan konseling KB dan kesehatan reproduksi.

Pembinaan kesehatan keluarga sebagai bagian dari pembangunan kesehatan ditujukan kepada upaya menumbuhkan perubahan sikap dan perilaku yang akan meningkatkan kemampuan keluarga itu sendiri untuk mengatasi masalah kesehatan dengan dukungan dan bimbingan tenaga profesional, menuju terwujudnya kehidupan keluarga sehat.

Untuk menekan angka kematian Ibu dan Angka kematian bayi maka perlu usaha-usaha sebagai berikut :

- a. keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi
- b. program perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan gerakan 1000 hari pertama kehidupan
- c. peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar maupun rujukan
- d. Pendataan ibu hamil baru dan Ibu hamil resiko tinggi secara aktif.
- e. Melaksanakan pertolongan persalinan di pasilitas pelayanan Kesehatan.
- f. Pertolongan Persalinan Resiko tinggi harus di pasilitas pelayanan rujukan bukan di pelayanan kesehatan dasar.
- g. Melaksanakan Kontak antara ibu hamil resiko tinggi dengan Dokter spesialis kandungan minimal 2 kali selama kehamilan.
- h. Meningkatkan peran serta keluarga ibu hamil resiko tinggi untuk mendukung persalinan.
- i. Melakukan supervisi supportif dan peningkatan kemampuan bidan melalui bimbingan tehnis atau monitoring dan evaluasi serta pelatihan (APN dan lainnya).
- j. Lebih meningkatkan lagi pembinaan dalam hal Pencatatan dan Pelaporan.
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap petugas/ pengelola program kesehatan anak di Puskesmas.
- l. Kemitraan lintas sektor dan kemitraan bidan dengan dukun.
- m. Optimalisasi pendataan KIA per triwulan.
- n. Alternatif pemberian zat besi yg bisa diterima ibu hamil.
- o. Tindak lanjut hasil ANC.
- p. Tersedianya Rumah Tunggu Kelahiran.

Upaya Perbaikan Gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi serta konsumsi pangan, sehingga berdampak pada perbaikan keadaan atau status gizi, terutama penurunan prevalensi gizi stunting.

Salah satu komponen terpenting untuk meningkatkan status gizi masyarakat yakni adanya perbaikan gizi di 1000 hari pertama kehidupan yang harus disiapkan sejak masa remaja putri pra nikah, kehamilan, dan anak sampai usia dua tahun.

Ada beberapa kegiatan dalam rangka perbaikan gizi masyarakat di Kabupaten Tanah Laut antara lain :

a. Pembinaan Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK)

Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan sesuai jadwal Posyandu yang mencakup 273 Posyandu yang tersebar di Kabupaten Tanah Laut

b. Pemberian Kapsul Vitamin A Dosis Tinggi

Kegiatan ini dilaksanakan di Puskesmas, Posyandu, dan Taman Kanak-kanak (TK), yang pelaksanaannya pada bulan Februari dan Agustus.

c. Pelayanan dan Konseling Gizi

Kegiatan ini dilaksanakan di Puskesmas dengan membuka poliklinik gizi yang buka setiap hari kerja sesuai dengan jam pelayanan, baik pasien yang datang langsung ke Puskesmas maupun pasien rujukan dari poli anak, KIA, BP yang ada di Puskesmas, bahkan ada rujukan dari kader posyandu.

d. Pemetaan Status Gizi

Pengembangan pemetaan informasi gizi balita berbasis wilayah yang memiliki tujuan yaitu menghasilkan sistem peta informasi status gizi balita untuk mendukung salah satu kegiatan manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yaitu pemantauan status gizi balita pada Program Perbaikan Gizi Masyarakat. sehingga dapat diketahui secara jelas wilayah mana saja yang masih ditemukan permasalahan gizi balita dan mempermudah dalam perencanaan dan pelaksanaan pencegahan terjadinya kasus gizi buruk.

e. pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) bagi petugas dan kader.

f. implementasi, dukungan dan pemantauan pemberian ASI Eksklusif, dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD),

g. surveilans gizi, dan pemberian intervensi serta operasi timbang

B. Urusan Pilihan

Dinas Kesehatan Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan yang dimaksud

1. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan
2. Program dan Kegiatan
3. Alokasi dan Realisasi Anggaran
4. Permasalahan dan solusi

C. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dinas Kesehatan Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan yang dimaksud

1. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan
2. Program dan Kegiatan
3. Alokasi dan Realisasi Anggaran
4. Permasalahan dan solusi

D. Urusan Pemerintahan Umum

Dinas Kesehatan Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan yang dimaksud

1. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan
2. Program dan Kegiatan
3. Alokasi dan Realisasi Anggaran
4. Permasalahan dan solusi

BAB III
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. Tugas Pembantuan Yang di Terima Dari Pemerintah / Pemerintah provinsi
Dinas Kesehatan Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan yang dimaksud.
1. Dasar Hukum
 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 3. Program, Kegiatan dan Pelaksanaan
 4. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
 6. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 7. Permasalahan dan Solusi
- B. Tugas Pembantuan Yang diberikan
Dinas Kesehatan Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan yang dimaksud.
1. Dasar Hukum
 2. Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
 4. Sarana dan Prasarana

BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Daerah

Dinas Kesehatan Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan yang dimaksud.

1. Mitra yang diajak kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
6. Jangka Waktu Kerjasama
7. Hasil Out put dari kerjasama
8. Permasalahan dan solusi

B. Koordinasi dengan Instansi Pertikal di Daerah

Dinas Kesehatan Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan yang dimaksud.

1. Nama Forum Koordinasi
2. Materi Koordinasi
3. Instansi Vertikal yang Terlibat
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan
6. Hasil dan Manfaat Koordinasi
7. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

C. Pengelolaan Kawasan Khusus

Dinas Kesehatan Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan yang dimaksud.

1. Jenis kawasan Khusus
2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus dan Dasar Hukum Penetapannya
3. Sumber Anggaran
4. Permasalahan yang dihadapi

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Dinas Kesehatan Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan yang dimaksud.

1. Bencana yang Terjadi Tahun 2019
2. Status Bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi pada Tahun 2019

E. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Dinas Kesehatan Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan yang dimaksud.

1. Gangguan yang terjadi Pada Tahun 2019
2. Penanggulangan dan Kendalanya
3. Keikutsertaan Aparat Keamanan dan Penanggulangan
4. Sumber dan Jumlah Anggaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tahun 2020 Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas kesehatan beserta 24 UPT adalah sebanyak 18 Program dan 46 Kegiatan dimana dengan anggaran Rp. 256.477.237.923,- dan realisasi anggaran adalah Rp. 195.455.442.323,- atau mencapai 76%.
2. Kendala yang dihadapi selama ini adalah kurang akuratnya dalam perencanaan terutama ketersediaan data base yang akurat, disamping kurang patuhnya PPTK dalam melaksanakan kegiatan sesuai anggaran kas serta ada beberapa pabrik yang tidak sanggup memenuhi permintaan barang.
3. Tahun 2020 ada mengalami peningkatan kasus Kematian Ibu dan Bayi yang mengakibatkan peningkatan terhadap Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Namun untuk angka prevalensi gizi mengalami peningkatan yang baik.
4. Beberapa program penurunan AKI dan AKB telah dilakukan melalui kebijakan *Making Pregnancy Safer* (MPS). Salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu dan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan ibu serta neonatal di tingkat pelayanan dasar dan pelayanan rujukan, disamping pemetaan gizi masyarakat yang mendukung manajemen kesehatan dalam penanggulangan gizi stunting

B. Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan

Pada Tahun 2020 ada beberapa penghargaan nakes teladan tingkat provinsi kalsel yang berhasil diraih oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. dr.E.Electa Ingrid Roselina Tinambunan (Puskesmas Tanjung Habulu), Tenaga Kesehatan Teladan (Katagori (Dokter)
2. Nuning Nur Widyawati,AM.AK (Puskesmas Sungai Riam) Tenaga Kesehatan Teladan (Katagori Analis Kesehatan)
3. Lailatul Ulfah, S.Farm., Apt (Puskesmas Tajau Pecah) Tenaga Kesehatan Teladan (Katagori Farmasi)
4. Sukaesih,Am.Keb (Puskesmas Pelaihari) Tenaga Kesehatan Teladan (Katagori Bidan)
5. Ainun, AM. kL (Puskesmas Tambang Ulang) Tenaga Kesehatan Teladan (Katagori Kesling)
6. drg. Sisca Hetiutami (Puskesmas Tanjung Habulu) Tenaga Kesehatan Teladan (Katagori Dokter Gigi)
7. Amin Nur Rohman, S.Kep.Ns (Puskesmas Tajau Pecah) Tenaga Kesehatan Teladan (Katagori Perawat)
8. Diana novita. AMG. (Puskesmas Kait-Kait) Tenaga Kesehatan Teladan (Katagori Gizi)

Output

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, rasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	5	Dinas Kesehatan	
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1	Dinas Kesehatan	
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6 Jenis Logistik	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	234 orang	Dinas Kesehatan	
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 Jenis Logistik	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	234 orang	Dinas Kesehatan	
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6 Jenis Logistik	Dinas Kesehatan	

				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	234 orang	Dinas Kesehatan	
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7 Jenis Logistik	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	280 orang	Dinas Kesehatan	
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.000 set	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	19 PKM	Dinas Kesehatan	
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 Jenis Logistik	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	19 PKM	Dinas Kesehatan	
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 Jenis Logistik	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	57 pkm	Dinas Kesehatan	
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 Jenis Logistik	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk	19 PKM	Dinas	

			kesehatan sesuai standar		pelayanan kesehatan sesuai standar		Kesehatan	
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 Jenis Logistik	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	19 PKM	Dinas Kesehatan	
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2 Jenis Logistik	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	19 PKM	Dinas Kesehatan	
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8 Jenis Logistik	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	80 orang	Dinas Kesehatan	
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	RDT HIV 8000 pcs	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	57 pkm	Dinas Kesehatan	

Outcome

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja		Sumber Data	Keterangan
2	Kesehatan	1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 210 ----- x 100 % Jumlah Penduduk di Kabupaten = 344.718	0.07%	Dinkes	
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 3 ----- x 100 % Jumlah RS di Kabupaten = 5	60%	Dinkes	
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 6.012 ----- x 100 % Jumlah ibu hamil di Kabupaten = 7.490	80%	Dinkes	

		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 6.464 ----- x 100 % Jumlah ibu bersalin di Kabupaten = 7.149	90%	Dinkes Dinkes	
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 6.529 ----- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten = 6.809	95.9%	Dinkes	
		6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 25.309 ----- x 100 % Jumlah balita di Kabupaten = 33.600	75%	Dinkes	
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 6.792 ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten = 27.012	25.14%	Dinkes Disdukcapil	

		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 87.689 ----- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten = 228.908	38 %	Dinkes Disdukcapil	
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 13.192 ----- x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten = 28.614	46%	Dinkes Disdukcapil	
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 13.847 ----- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten = 39.410	35%	Dinkes	
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 4.431 ----- x 100 % Jumlah penderita DM di Kabupaten = 17.769	24%	Dinkes	

		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 503 ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten = 500	100.6%	Dinkes	
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 450 ----- x 100 % Jumlah penderita TBC di Kabupaten = 395	113.92%	Dinkes	
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 2 ----- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten = 2	100 %	Dinkes	